


|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | <b>News Title : Mainan Baru Bappebti</b>   |                                      |
|   | <b>Media Name : Koran Tempo</b>  | <b>Journalist : Vindry Florentin</b> |
|   | <b>Publish Date : 13 January 2023</b>  | <b>Tonality : Positive</b>           |
|   | <b>News Page :</b>   | <b>News Value : 330,000</b>          |
|   | <b>Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Bhima Yudhistira (Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios))</b> | <b>Ads Value : 110,000</b>           |
|   | <b>Section/Rubrication : Ekonomi dan Bisnis</b>  | <b>Topic : Bursa Aset Kripto</b>     |

## Mainan Baru Bappebti

Vindry Florentin

Jumat, 13 Januari 2023

UU PPSK mengalihkan tugas pengawasan aset kripto dan derivatif yang semula di Bappebti ke OJK. Apa yang akan dilakukan Bappebti?

0 Komentari



Ilustrasi kripto. REUTERS/Benot Tassier

**JAKARTA** — Setelah kehilangan tugas mengawasi perdagangan aset kripto dan derivatif, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) mengutar ulang fokus kerjanya. Hal itu terjadi setelah pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) pada 15 Desember 2022. Aturan tersebut mengatur peralihan tanggung jawab pengawasan aset kripto dan derivatif yang selama ini diurus Bappebti ke tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Transisi kewenangan ini disiapkan dua tahun setelah peraturan tersebut diundangkan.

"Saya harus cari mainan baru," kata pelaksana tugas Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, kepada Tempo, Rabu, 11 Januari 2023. Salah satu hal yang akan dilakukan Bappebti setelah adanya peralihan itu, kata dia, adalah memberi perhatian lebih kepada bursa komoditas. Salah satunya berupaya membentuk harga referensi. Dia ingin bursa komoditas di dalam negeri menjadi kiblat harga di pasar dunia.

Kebijakan pembertukan harga acuan oleh Bappebti sebenarnya sudah diamanatkan sejak puluhan tahun lalu, tapi belum kunjung terwujud. Tugas itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang kemudian diamanatkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Jika berhasil memvahi amanat itu, dia yakin bakal ada transparansi harga **komoditas** yang berguna buat petani hingga pemerintah.

Didid mengatakan infrastruktur untuk membentuk harga acuan sudah siap. "Tuganya kini membuat kebijakan yang bisa menggerakkan lebih banyak pedagang masuk bursa alias melakukan transaksi multilateral kotimbang menjual produknya secara bilateral dengan pembeli langsung. Salah satu strateginya adalah menyiapkan insentif untuk perdagangan multilateral. Dia menargetkan sekitar 95 persen transaksi komoditas dilakukan secara bilateral. "Target kami bisa membuat go-go antara bilateral dan multilateral."

Tugas penting lainnya adalah menentukan komoditas yang akan dijadikan rujukan. Dia sedang mempertimbangkan banyak jenis, dari minyak sawit mentah, kopi, karet, hingga kayu manis. Namun tahun ini minimal satu jenis yang bakal disasar. Salah satu kriterianya adalah komoditas yang merajai pasar dunia.

Pembeli bisa didorong lebih mudah masuk bursa karena Indonesia sudah menjadi tumpuan. "Mungkin kami akan mulai dengan kayu manis," kata Didid. Namun, ia menekankan, timnya masih mengkaji. Kayu manis Indonesia saat ini memenuhi sekitar 70 persen kebutuhan konsumsi global.

Target lain Didid pada tahun ini adalah mengembangkan sistem resi gudang. Sistem ini memungkinkan petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menyimpan produk mereka di gudang yang menerbitkan resi, untuk kemudian dijual dengan harga yang terjangkau. Tanda terima tersebut bisa berguna sebagai agunan untuk bank atau lembaga keuangan lainnya.

Sistem ini, dalam penilaian Didid, dapat meningkatkan akses pembiayaan petani, nelayan, dan pelaku UMKM agar dapat berproduksi secara teratur. "Mereka yang ikut program ini pendapatannya 1,6 kali lebih tinggi dibanding yang tidak ikut," kata dia. Namun belum banyak peserta sistem resi gudang ini.

Didid bakal menggearkan lebih banyak sosialisasi ke petani, nelayan, UMKM, hingga pemerintah daerah mengenai fasilitas tersebut. Dia juga mempertimbangkan komoditas lain yang bisa ditampung masuk gudang tersebut. Saat ini terdapat 20 jenis komoditas yang mendapat lampu hijau.



Ilustrasi kripto. Shutterstock

### Bappebti Dianggap Perlu Terlibat dalam Bursa Kripto

Didid mengatakan peralihan wewenang pengawasan aset kripto dan derivatif ke OJK bukan disebabkan oleh kegagalan Bappebti. "Melihat data, tidak ada hal yang mengancam Bappebti gagal mengelola keuangannya." Dia mengatakan peralihan ini merupakan antisipasi gangguan pada stabilitas sektor keuangan yang berpotensi timbul saat aset-aset tersebut berkembang. Hal ini merupakan kajian Kementerian Keuangan.

Namun dia tak menampik masih banyak catatan soal perdagangan **aset kripto** dan derivatif yang sekarang berjalan. Itu sebabnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan secara khusus meminta Bappebti berbenah sebelum menyerahkan tugasnya ke OJK. "Jadi, ketika aset kripto dan derivatif dipindahkan ke OJK, barang itu bisa langsung berjalan dengan baik."

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menganggap Bappebti masih perlu dilibatkan dalam **bursa kripto**. Sebab, pengelolaan komoditas merupakan tugas badan di bawah Kementerian Perdagangan tersebut. "Regulasi aset kripto sebaiknya berfokus pada penguatan sistem pengawasan yang dilakukan Bappebti," kata dia. Keterlibatan Bappebti bisa juga dilakukan dengan mentransfer pegawai mereka ke OJK.

Tempo mencoba menghubungi Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar, mengenai persiapan OJK menerima tambahan wewenang ini. Namun dia tak menjawab. Juru bicara OJK, Sekar Puthi Djatut, pun tak merespon.

VINDRY FLORENTIN